



POLITICOS:

Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

Abdul Rahman Ma'mun

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, Jakarta

Email: rahmanmamun1@yahoo.com

How to Cite: Ma'mun A, R. (2023). Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3 (1): 1-16. Doi: <https://doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.1-16>

Abstract

This paper discusses the issue of the policy of relocating the National Capital (IKN) which has raised controversy, lawsuits and rejection from some people, even though it has been supported by the IKN Law Number 3 of 2022. The purpose of writing this article is to answer the question of how to communicate the political communication of the policy of relocating the IKN and why do political communication problems arise regarding funding for the development of the IKN Nusantara? Political communication theory from Pureklolon (2016) and Harold D. Laswell (2016) is used to analyze political communication from actors, the Government, to the media and the public with 'messages' regarding IKN funding. Political economy theory a classical approach from Caporaso (2008) is used to analyze the choice of IKN funding policies that rely on the private sector and foreign investors rather than the state budget. This study uses a qualitative method with inductive and descriptive analytical data analysis, namely building patterns, categories, and themes from the bottom up (inductive), from empirical observations of socio-political phenomena. The results of the discussion of this study show that the problems of political communication in IKN funding arise due to 3 factors, (1) There is no political communication strategy plan for relocating the IKN in the Strategic Plan of the Ministry of Communication and Informatics (Kemkominfo) 2020-2024 even though IKN is a national strategic program. It is not clear who the Government's 'communicator' is and there is no 'single narrative' as the main 'message' of political communication (2) Transparency of IKN funding sources and when funding from investors does not meet expectations is also unclear (3) Crisis communication mitigation is not prepared to overcome political communication with potential investors or the public. The three factors causing the problem of political communication on IKN funding, if left unchecked, will make the public tend to doubt that the issue of IKN funding will be able to be managed properly by the Government.

Keywords: *the national capital; political communication; funding*

Abstrak

Tulisan ini membahas permasalahan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang memunculkan kontroversi, gugatan dan penolakan dari sebagian masyarakat, meskipun telah didukung dengan Undang-undang IKN Nomor 3 Tahun 2022. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana

komunikasi politik kebijakan pemindahan IKN dan mengapa muncul problematika komunikasi politik mengenai pendanaan pembangunan IKN Nusantara? Teori komunikasi politik dari Pureklolon (2016) dan Harold D. Laswell (2016) digunakan untuk menganalisis komunikasi politik dari para aktor, Pemerintah, kepada media maupun publik dengan ‘pesan’ mengenai pendanaan IKN. Sedangkan teori ekonomi politik dengan pendekatan klasik dari Caporaso (2008) digunakan untuk menganalisis pilihan kebijakan pendanaan IKN yang mendakan swasta dan investor asing daripada APBN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data secara induktif dan deskriptif analitis, yakni membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-tema dari bawah ke atas (induktif), dari observasi empirik fenomena sosial politik. Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan problematika komunikasi politik pendanaan IKN muncul karena 3 faktor, (1) Tidak ada rencana strategi komunikasi politik pemindahan IKN dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2020-2024 meski IKN merupakan program strategis nasional. Tidak jelas siapa ‘komunikator’ Pemerintah dan tidak ada ‘narasi tunggal’ sebagai ‘pesan’ utama komunikasi politik (2) Transparansi sumber pendanaan IKN dan bila pendanaan dari investor tidak sesuai harapan juga tidak jelas (3) Mitigasi komunikasi krisis tidak disiapkan untuk mengatasi komunikasi politik dengan calon investor ataupun publik. Ketiga faktor penyebab problematika komunikasi politik pendanaan IKN tersebut bila dibiarkan akan membuat publik cenderung meragukan bahwa isu pendanaan IKN akan mampu dikelola dengan baik oleh Pemerintah.

Kata kunci: ibu kota negara; komunikasi politik; pendanaan

I. PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dengan nama baru Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segera bisa mulai dilaksanakan setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nomor 3 Tahun 2022 disetujui DPR dan Februari 2022 lalu ditandatangani Presiden Jokowi. Target terdekat dalam dua tahun pertama ke depan adalah bahwa pada 17 Agustus 2024 Presiden Jokowi sudah bisa berkantor dan memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Negara Nusantara. Itu artinya pada pertengahan tahun 2024 infrastruktur fisik untuk pusat pemerintahan harus sudah terbangun dan dapat beroperasi secara baik. Presiden Jokowi menyatakan alasan utama pemindahan ibu kota negara adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru,

sekaligus mempercepat pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Karena selama ini kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa (Majelis, 2022).

Pembangunan IKN memang sudah dimulai. Pada awal bulan Desember 2022, di calon lokasi IKN Nusantara di Kalimantan Timur itu Kementerian PUPR mulai membangun jaringan jalan lingkar dan Bendungan Sepaku Semoi. Di lokasi yang kelak akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yakni Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, saat ini telah berdiri 11 tower. Gedung-gedung dengan tinggi 6 lantai itu dibangun sangat cepat, setiap tower hanya perlu waktu tiga minggu untuk berdiri itu. Jajaran gedung itu sudah siap menjadi hunian untuk para pekerja membangun IKN (Gaffar, 2022).

Namun demikian masih ada beberapa

isu yang belum jelas benar. Bahkan beberapa di antaranya menjadi kontroversi, seperti isu ekonomi politik, dampak sosial dan lingkungan hidup, yang masih menjadi perdebatan dalam wacana publik. Dari sisi ekonomi politik misalnya, pembangunan IKN Nusantara ini dinilai memiliki risiko cukup besar karena kondisi ekonomi Indonesia tengah berada dalam fase pemulihan pasca pandemi Covid-19 (INDEF, 2019). Dari aspek lingkungan hidup, pemindahan ibu kota negara ini sepanjang data dan informasi yang dikomunikasikan ke publik terlihat sebagai rencana pembangunan jangka pendek, misalnya pembukaan hutan untuk lahan infrastruktur ibu kota. Hal ini dinilai tidak mampu menjawab permasalahan lingkungan hidup terutama terkait isu krisis iklim. Dalam jangka panjang hal tersebut dapat menimbulkan konflik vertikal, sosial-ekonomi. Temuan Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa lokasi ibu kota baru ini tidak bebas dari kebakaran hutan dan kabut asap. Selama krisis kebakaran hutan tahun 2015 ada sebanyak 3.487 titik api di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun ini sudah ada 105 titik api, dengan musim kebakaran hutan yang belum menunjukkan tanda berhenti (Greenpeace, 2019). Analisis Greenpeace menunjukkan total area 'burnscar' yang terkena dampak kebakaran hutan seluas 35.785 hektar antara 2015-2018.

Pembahasan tentang kebijakan pemindahan IKN Nusantara telah dilakukan beberapa peneliti dalam berbagai aspek seperti bentuk pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara yang baru, aspek

ekologis, dan aspek ekonomi kebijakan pemindahan IKN. Penelitian tentang beragam riset sosial politik tentang isu perpindahan IKN antara lain dilakukan oleh Baharudin, Nurmandi, Qodir, Jubba & Syamsurrijal (2022), yang membahas *Bibliometric Analysis of Socio-Political Research on Capital Relocation: Examining Contributions to the Case of Indonesia* (Burhanuddin at all., 2022). Kajian ini menganalisis perubahan terkini isu pemindahan IKN Indonesia dengan menelusuri 176 dokumen penelitian namun sangat sedikit penelitian yang mendetail tentang pemindahan ibu kota suatu negara, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus di Indonesia.

Penelitian lain yang membahas aspek komunikasi politik kebijakan pemindahan IKN dilakukan oleh Hairunnisa dan Wisda Aprilia Syaka (2022), yaitu *Analisis Komunikasi Politik dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan* (Hairunnisa dan Syaka, 2022). Penelitian ini berusaha mendeskripsikan kajian perspektif komunikasi politik yang diperlukan dalam upaya membangun sebuah komunikasi dengan para pemangku kepentingan, guna mengetahui tantangan pembangunan IKN ke depan. Penelitian ini juga memberikan sebuah gambaran langkah strategis agar pembangunan IKN berlangsung secara optimal yaitu melalui strategi komunikasi politik, yaitu strategi komunikasi politik melalui representasi identitas budaya dalam pembangunan IKN.

Dari beberapa penelitian terdahulu di

atas penulis mencoba untuk membahas topik yang belum diteliti yaitu pembahasan kebijakan pemindahan IKN Nusantara ini dari aspek komunikasi politik yang terkait dengan pendanaan pembangunan IKN. Bagian dari soal ekonomi yang masih mengemuka menjadi pertanyaan di publik adalah mengenai pendanaan pembangunan IKN. Belum jelasnya sumber pendanaan dan bagaimana mengimplementasikan pembangunan IKN dalam dua tahun pertama ini tidak begitu terang dikomunikasikan oleh Pemerintah atau komunikator pemerintah. Komunikasi politik pada isu pendanaan IKN ini sepertinya memiliki problematika tersendiri. Komunikasi politik dari para aktor, Pemerintah, kepada media maupun publik tentang kebijakan pemindahan IKN ini juga tidak optimal. Padahal proyek pembangunan IKN ini akan memerlukan partisipasi swasta yang tentunya tak dapat dilepaskan dari kepentingan para pemodal atau pelaku ekonomi lainnya.

Munculnya kontroversi terhadap kebijakan pemindahan ibu kota ini menjadi konsekuensi dari komunikasi politik Pemerintah yang masih problematik, khususnya dalam hal pendanaan proyek pembangunan IKN. Sepanjang yang dikomunikasikan oleh Pemerintah, rencana pendanaan pembangunan IKN ini merupakan sebuah proyek besar dengan pendanaan mencapai Rp 466 triliun. Pendanaan yang demikian besar ini dilakukan di tengah ekonomi nasional yang belum pulih pasca Pandemi, di sisi lain pemindahan ibu kota ini memang dimaksudkan untuk mengurangi

kesenjangan dan meningkatkan pertumbuhan. Namun riset INDEF menunjukkan secara ekonomi pemindahan IKN dinilai tidak dapat mendorong pertumbuhan PDB dan GNP riil. Kajian dengan model keseimbangan umum ekonomi mengungkapkan dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan PDB justru dinilai tidak ada sama sekali (0%) dalam jangka pendek, serta potensi bagi pertumbuhan PDRB provinsi tujuan hanya 0,24% (INDEF, 2019).

Problematika komunikasi juga muncul karena proses perumusan dan pembentukan kebijakannya berlangsung sangat cepat. Sebagai gambaran, penyusunan UU IKN yang hanya kurang dari dua bulan. Bagaimanapun pemindahan IKN ini merupakan sebuah proyek besar dengan pendanaan mencapai Rp 466 triliun. Namun dalam proses perumusan dan pembentukan kebijakannya berlangsung sangat cepat. Sebagai gambaran, penyusunan UU IKN yang hanya kurang dari dua bulan. Maka bisa dipahami ketika banyak orang tidak tahu persis, apa alasan sesungguhnya kebijakan pemindahan IKN itu selain soal pemerataan ekonomi. Akibatnya hal ini memicu rasa ingin tahu lebih mendalam mengenai persoalan ini. Mengingat ada hak publik untuk tahu (right to know) mengenai informasi publik (right to information) yang dijamin oleh UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP No.14/2008) dan konstitusi UUD 1945 pasal 28F. Yaitu bahwa, "Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan semua jenis saluran yang tersedia”.

Sebagai sebuah kebijakan yang strategis pemindahan IKN ini perlu pertimbangan yang komprehensif dari berbagai perspektif. Karena selain akan berkonsekuensi pada timbulnya masalah sosial, budaya dan ekonomi, juga secara proyek pembangunan sebuah ibu kota memerlukan pendanaan yang besar. Di sisi lain ketika kebijakan ini diputuskan, Indonesia, sebagaimana banyak negara di dunia sedang dilanda Pandemi Covid-19, yang berlangsung sejak awal 2022 hingga awal 2022. Situasi ini berdampak pada perekonomian negara yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi Covid-19.

Dalam aspek komunikasi politik mengenai kebijakan pemindahan IKN kemudian muncul beberapa persoalan yang menjadi perdebatan di publik. Menurut Pureklolon (2016) komunikasi politik merupakan proses di mana kepemimpinan nasional, media dan masyarakat saling bertukar dan memberi makna terhadap pesan-pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pesan dalam komunikasi politik terkonsentrasi pada lingkungan pemerintahan atau yang berkaitan dengan kebijakan publik. Komunikasi politik terjadi ketika masyarakat, media dan pemerintah saling “berdialog” mengenai isu-isu seputar elit dan publik (Pureklolon, 2016). Dengan kata lain, bila komunikasi politik berlangsung efektif maka kebijakan publik akan dapat dieksekusi dengan efektif pula

dengan tingkat kegaduhan yang dapat dikelola.

Harold D. Lasswell mengungkapkan Model Analisis Komunikasi sebagai "who says what in what channel to whom with what effect" yang bila diurai sebagai siapa (komunikator) mengatakan apa (pesan), melalui saluran apa (media), kepada siapa (khalayak) dengan akibat (efek) apa (Wahid, 2016). Dalam konteks komunikasi politik kebijakan pemindahan IKN pemerintah dalam posisi sebagai komunikator politik selain perlu strategi komunikasi dengan ‘pesan’ yang jelas dan transparan, juga membuka kanal partisipasi yang lebih substantif agar efek dari komunikasi kepada rakyat sebagai khalayak akan positif dalam kebijakan pemindahan IKN ini. Bila komunikasi politik yang diperlukan untuk membuka ruang publik bagi percakapan dan partisipasi publik terjadi maka setiap warga masyarakat yang terdampak, baik itu masyarakat adat, ASN yang akan bekerja di IKN serta penduduk sekitar IKN Nusantara dapat menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan IKN yang berbasiskan kepentingan publik.

Dari aspek ‘pesan’ komunikasi politik dalam hal pendanaan pembangunan IKN, maka perlu juga mencermati rencana pendanaan dari Pemerintah. Hal ini agar bisa melihat lebih detil tentang konten apa yang selayaknya menjadi ‘pesan’ terpenting dalam komunikasi politik Pemerintah. Pada tahap awal pembangunan IKN menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2019 tentang RPJMN 2020-2024, dari rencana anggaran pembangunan IKN

sebesar Rp 466,98 Triliun. yang bersumber dari APBN hanya 19,8% (Rp 93,5 triliun). Selengkapnya, Pemerintah menyiapkan skema Kerjasama Pemerintah & Badan Usaha (KPBU) dengan porsi terbesar, yaitu 54,6% (Rp 254,436 triliun), dan Swasta, termasuk investor sebesar 26,2% (Rp 122,092 triliun). IKN Nusantara yang akan dibangun dengan dana sebesar itu nantinya diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, mempercepat pemerataan dan keadilan ekonomi.

Caporaso dalam teori ekonomi politik dengan pendekatan klasik memiliki proposisi bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri. Pandangan seperti ini dijadikan dasar untuk melaksanakan kebijakan *Laissez-faire* atau membiarkan pasar bekerja sendiri. Argumen yang diajukan oleh pemikir aliran klasik ini adalah sistem pasar, yakni sebuah realitas yang *sui generis* (mampu menciptakan dirinya sendiri atau akan tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia) di mana pasar memiliki hubungan dengan negara tetapi pasar bukan organ bawahan dari negara (Caporaso, 2008).

Teori ekonomi klasik Caporaso bahwa pasar akan bisa bergerak dan mengatur dirinya sendiri ini relevan untuk menganalisis pendanaan IKN yang oleh Pemerintah dikomunikasikan bahwa hanya sebagian 'kecil' sekitar 20 persen yang didanai dari APBN, dan selebihnya (80 persen) pendanaan diharapkan melalui KPBU dan investasi swasta terutama dari investor asing. Artinya sebagian besar

pendanaan IKN diserahkan kepada pasar, sementara apakah pasar dalam situasi sekarang ini, ketika ekonomi belum pulih dan ketidakpastian kondisi-kondisi lain dalam pembangunan IKN masih ditemukan, mampukah pasar mengatur dirinya sendiri. Hal ini memerlukan komunikasi mengenai rencana pendanaan yang lebih akurat dan tidak problematik.

Sebagai gambaran komunikasi yang masih problematik ini bisa dilihat, bahwa meski secara politik dukungan UU IKN telah dibuat oleh Pemerintah bersama DPR, namun dukungan publik secara luas tidak diperoleh secara memadai hingga saat ini. Teori ekonomi klasik Caporaso ini berguna untuk menganalisis kebijakan pemindahan IKN yang oleh Pemerintah di sisi lain pendanaannya sebagian 'kecil' sekitar 20 persen oleh APBN, dan selebihnya diserahkan pada pasar, dalam hal ini melalui KPBU dan investasi swasta terutama dari investor asing.

Meskipun secara politik dukungan UU IKN telah dibuat oleh Pemerintah bersama DPR, namun dukungan publik secara luas tidak diperoleh secara memadai hingga saat ini. Beberapa pihak dari masyarakat sipil menyatakan terjadi pencatutan partisipasi saat proses penyusunan UU IKN, yang mengatasnamakan beberapa kelompok organisasi masyarakat sipil. Misalnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tertulis dalam daftar hadir, namun kedua organisasi tersebut tidak menghadiri acara tersebut karena tidak menerima undangan secara resmi

(Koran Tempo, 2022).

Selain mempertanyakan, sebagian kelompok bahkan menolak kebijakan pemindahan IKN. Para tokoh antara lain mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, Ekonom Faisal Basri, analis kebijakan publik Agus Pambagio menolak kebijakan pemindahan IKN dan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada juga pihak lain juga mengajukan gugatan judicial review UU IKN ke MK, yaitu Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN), meskipun kemudian MK memutuskan menolak semua gugatan terhadap UU IKN (CNN Indonesia, 2022).

Dengan demikian permasalahan utama dalam tulisan ini adalah bahwa kebijakan pemindahan IKN Nusantara ini masih memunculkan kontroversi pada aspek ekonomi politik, lingkungan hidup dan pendanaan pembangunan IKN, meskipun telah ditetapkan UU IKN sebagai regulasi pendukung. Kontroversi dalam beberapa aspek tersebut muncul karena komunikasi politik yang akan menjadi pembuka partisipasi publik yang bermakna (signifikan) memiliki problematika tersendiri. Misalnya dengan penyusunan UU IKN yang sangat cepat, sehingga tidak cukup dikomunikasikan kepada publik dengan baik. Demikian pula dikomunikasikan tentang rencana pendanaan yang sebagian besar (80 persen)

diharapkan dari investor. Komunikasi politik dari para aktor, baik Pemerintah, pemangku kepentingan, kepada media maupun dengan publik dalam kebijakan pemindahan IKN yang tidak optimal dilakukan terutama menyangkut aspek ekonomi politik, khususnya mengenai pendanaan pembangunan IKN. Dengan demikian permasalahan utama dalam tulisan ini adalah bahwa kebijakan pemindahan IKN Nusantara ini masih memunculkan kontroversi meski telah ditetapkan UU IKN sebagai regulasi pendukung. Hal ini karena aspek komunikasi politik yang akan menjadi pembuka partisipasi publik yang bermakna (signifikan) memiliki problematika tersendiri. Komunikasi politik dari para aktor, baik Pemerintah, pemangku kepentingan, kepada media maupun dengan publik dalam kebijakan pemindahan IKN yang tidak optimal dilakukan terutama menyangkut aspek ekonomi politik, khususnya pada tahap ini mengenai pendanaan pembangunan IKN. Oleh karena itu problematika komunikasi politik pendanaan pembangunan IKN ini perlu diteliti dan ditelisik lebih dalam. Terlebih lagi proyek pembangunan IKN yang melibatkan partisipasi swasta tak akan lepas dari kepentingan para pemodal dan pelaku ekonomi lainnya.

Dengan demikian, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mencari jawab atas pertanyaan bagaimana komunikasi politik kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara dan mengapa muncul problematika komunikasi politik pada aspek ekonomi khususnya mengenai

pendanaan pembangunan IKN Nusantara? Hasil pembahasan artikel ini yang merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut diharapkan akan menjadi masukan bagi kebijakan komunikasi politik mengenai pendanaan IKN.

II.METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang lebih menekankan pada eksplanasi yang mendalam atas topik yang dibahas. Peneliti menafsirkan data yang ada, mulai dari mendeskripsikan individu atau setting fenomena yang menjadi topik penelitian, mengambil kesimpulan penelitian, analisa teori yang digunakan hingga membuat pertanyaan yang lebih jauh untuk menjelaskan isu tersebut dalam kerangka berpikir yang lain. Penelitian ini mengedepankan salah satu karakteristik utama penelitian kualitatif yaitu penggunaan metode induktif data analisis (menggunakan analisis data secara induktif) membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-temanya dari bawah ke atas (induktif), dari observasi empirik atas suatu fenomena sosial politik (Creswell, 2016).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan turunan dari pendekatan kualitatif, metode ini melakukan penelitian atas obyek atau peristiwa, yang dilukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta (Horisson, 2007). Deskriptif analisis juga berfungsi untuk mendeskripsikan dan memberikan sebuah gambaran objek yang diteliti melalui data ataupun sampel.

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analitis yang merupakan turunan dari pendekatan kualitatif, metode ini melakukan penelitian atas obyek atau peristiwa, yang dilukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta (Horisson, 2007).

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemindahan IKN merupakan salah satu agenda proyek prioritas strategis nasional. Ini berarti dalam kurun waktu 2020-2024 proyek pemindahan IKN yang nilai pendanaannya mencapai Rp 466 triliun harus dilaksanakan. Proyek pemindahan IKN ini dimaksudkan oleh Pemerintah untuk mempercepat pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Pemerintah meyakini pemindahan IKN akan memberikan sejumlah manfaat ekonomis antara lain peningkatan PDB nasional, pemerataan pembangunan, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, dan kesejahteraan secara umum. Namun kajian INDEF pada 2019 menunjukkan secara ekonomi pemindahan IKN dinilai tidak dapat mendorong pertumbuhan PDB dan GNP riil. Kajian dengan model keseimbangan umum ekonomi mengungkapkan dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan PDB justru dinilai tidak ada sama sekali (0%) dalam jangka pendek, serta potensi bagi pertumbuhan PDRB provinsi tujuan hanya 0,24% (INDEF, 2019).

Pemindahan IKN juga mendorong

terjadinya penurunan output di hampir semua sektor yang berbasis sumber daya alam. Ada juga dampak lain berupa potensi inflasi akibat meningkatnya permintaan barang dari besarnya jumlah penduduk yang masuk secara bersamaan. Terlebih lagi dalam kondisi pasca-pandemi Covid-19 di mana perekonomian negara masih tertekan, ditambah lagi prediksi IMF bahwa akan terjadi perlambatan ekonomi global terjadi akibat perang di Rusia-Ukraina, juga naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok, yang mendorong para investor untuk berinvestasi di aset-aset yang aman (Hariyadi, 2020). Oleh karena itu kebijakan pemindahan IKN ini dalam jangka pendek akan membuat peran Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bersama swasta makin terbatas ruang pendanaannya. Peran dominan pembiayaan negara melalui APBN akan tetap dituntut lebih signifikan.

Rencana mendatangkan investor asing sebagai pihak swasta dalam pembangunan IKN ini juga mengalami tarik-ulur yang belum menemukan kejelasan. Oleh karenanya bila kebijakan pemindahan IKN ini akan terus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, maka pendanaan menjadi isu sentral kebijakan pemindahan IKN ini. Dalam situasi demikian sebagai proyek prioritas strategis nasional yang sarat nilai politik dan simbolik yang dianggap penting bagi pemerintahan Presiden Jokowi, maka proyek pemindahan IKN Nusantara ini kemudian membutuhkan semacam ‘pemaksaan

politik’. Kebijakan pemindahan IKN ini pada akhirnya lebih kuat sifat politisnya, alih-alih sebagai solusi bagi kesejahteraan, pemerataan ekonomi dan kesenjangan ekonomi antara wilayah Jawa dan luar Jawa, khususnya dengan wilayah Indonesia bagian timur. Dalam kerangka itu diperlukan pendekatan komprehensif, termasuk pendekatan komunikasi politik pada aspek ekonomi politik terutama tentang pendanaan pembangunan IKN.

Komunikasi politik Pemerintah tentang pemindahan IKN dimulai ketika secara resmi disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2019 saat menyampaikan pidato kenegaraan di depan MPR (Haryati, 2019). Kemudian pada 26 Agustus 2019 di Istana, Presiden secara resmi mengumumkan ibu kota pindah dari Jakarta ke lokasi baru yang sebagian masuk Kabupaten Panajam Paser Utara dan Sebagian lagi masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menyusul kebijakan tersebut muncul problematika komunikasi politik ketika terjadi penolakan dan kritik dari masyarakat sipil, akademisi dan politisi yang menjadi kontroversi berkepanjangan.

Problematika komunikasi politik kebijakan pemindahan IKN ini terutama pada aspek pendanaan pembangunan IKN Nusantara, yang sebagian menilai akan berisiko tinggi, baik didanai APBN maupun bila didanai investasi asing. Beberapa hal berikut ini diidentifikasi menjadi faktor yang memicu timbulnya problematika komunikasi politik mengenai pendanaan IKN Nusantara.

Tabel 1. Proyek Prioritas Strategis Pemindahan IKN Nusantara

Latar Belakang	Terpusatnya kegiatan perekonomian di Ibu Kota Jakarta dan Jawa mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan Luar Jawa
Manfaat	<p>Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa mendorong percepatan pengurangan kesenjangan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di Luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI. Mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah • Estimasi peningkatan Real GDP Nasional sebesar 0,1% - 0,2% dan Output Multiplier 2,3; • Peningkatan Kesempatan Kerja (Employment Multiplier 2,9); • Penurunan Kemiskinan dan kesenjangan antarkelompok pendapatan (Kenaikan Price of capital 0,23% dan Kenaikan Price of Labour 1,37%). Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris. Ketersediaan lahan yang luas dapat membangun ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun. Mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek
Lokasi	Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur.
Durasi	2020-2024 (5 tahun).
Indikasi Target	<p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan IKN. • Penyusunan Matek RTR KSN IKN, RDTR Pusat Pemerintahan IKN, RDTR Pusat Ekonomi IKN. • Penyiapan Kerangka Regulasi dan Kebijakan serta Lembaga Pelaksana. • Perencanaan Teknis. <p>2021 • Pengadaan lahan (Tahap I). • Peninjauan Kembali dan Revisi PP RTRWN dan RTR Pulau Kalimantan. • Pembangunan akses dan infrastruktur dasar.</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Istana Negara. • Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-Polri, gedung perkantoran, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap I). • Pengadaan lahan (Tahap II). • Penetapan PP RTRWN. • Penyusunan Perpres RDTR BWP IKN. <p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan rumah dinas dan sarana kesehatan (tahap I). • Pembangunan jaringan jalan makro, bangunan TNI-Polri, gedung perkantoran, rumah dinas, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap II). <p>2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jaringan jalan mikro dan RTH. • Pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan (Tahap II), rumah dinas (Tahap III & IV), listrik (Tahap III). Total Perencanaan dan pembangunan Rp 466,98 Triliun
Indikasi Penda- naan	<ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp91,29 triliun. KPBU: Rp252,46 triliun. Badan Usaha: Rp123,23 triliun
Pelaksa- na	Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Setneg, Kemenkeu, Kemhan, TNI, POLRI, BIG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Kominfo, Kemenhub, Kemendagri, Badan Otorita IKN, BUMN, Swasta.
High- light Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibu Kota Negara (Bappenas, ATR/BPN, Kemendagri, Setneg, Kemenkeu) Perencanaan Ibu Kota Negara (Masterplan, RTR, RDTR, KLHS) – (Bappenas, ATR/BPN, KLHK, PUPR) Penyusunan Grand Design Rencana Mobilisasi dan Insentif Pemindahan ASN, TNI, POLRI (Kementerian PANRB, BKN) Pembangunan Infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Kementerian PUPR, Kemenhub, Kominfo, ESDM, PLN) Pembangunan Infrastruktur markas besar dan pangkalan militer TNI AD, AL, AU dan POLRI (Kemhan, TNI, POLRI)

Sumber: Lampiran 2 Perpres No. 18 Tahun 2019 tentang RPJMN 2020-2024.

Ketiadaan Rencana Strategis Komunikasi Politik IKN

Rencana strategis komunikasi politik pembangunan IKN tidak ditemukan dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2020-2024. Padahal Presiden Jokowi sudah menyatakan rencana kebijakan pemindahan IKN ini pada Agustus 2019, dan proyek IKN ini merupakan program prioritas. Bila dicermati secara kronologis, ketiadaan rencana strategis komunikasi politik pembangunan IKN dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2020-2024 ini kemungkinan karena Renstra Kemkominfo disusun sebelum adanya rencana kebijakan pemindahan IKN. Sehingga ketika Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota dan kemudian UU IKN disahkan pada 15 Februari 2022, Renstra Kemkominfo 2020-2024 telah tersusun dan tidak memasukkan rencana strategi komunikasi pemindahan IKN.

Akibat ketiadaan rencana strategis komunikasi IKN ini memunculkan problem dalam melakukan komunikasi mengenai pendanaan IKN, setidaknya dalam dua unsur, mengacu pada model analisis komunikasi Laswell. Pertama, unsur 'komunikator' (who), yakni siapa yang menjadi komunikator pemerintah tidak ditentukan dan disiapkan secara memadai. Kedua, unsur 'pesan' (what), yakni apa konten yang disiapkan sebagai 'narasi tunggal'.

Bila mengacu pada setiap kebijakan

strategis Pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya pada periode 2014-2019 selalu disiapkan 'narasi tunggal' dalam strategi komunikasi, seperti narasi tunggal mengenai kebijakan 'Revolusi Mental' pada 2014. Namun pada kebijakan pemindahan IKN ini Kemkominfo tidak menyiapkan 'narasi tunggal' mengenai informasi pendanaan IKN. Akibatnya mudah ditemukan munculnya pernyataan pejabat pemerintah yang tidak sinergis satu dengan pejabat yang lain. Bahkan kadang bertentangan.

Sebagai contoh, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono membuka skema pendanaan pembangunan IKN melalui crowdfunding atau urun dana untuk menjadi alternatif, yaitu melalui dukungan pendanaan dari masyarakat untuk pembangunan IKN. Pada saat yang hampir sama Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menanggapi bahwa rencana crowdfunding juga masih belum pasti dan simpang siur, karena harapan terbesar adalah ada investasi. Pernyataan Wagub Kalimantan Timur yang terkesan meragukan pernyataan Ketua Otorita IKN itu termuat di laman resmi Sekretariat Kabinet RI, pada Selasa 29 Maret 2022 (Fairoussaniy, 2022).

Meskipun rencana urun dana masyarakat untuk pendanaan pembangunan IKN itu kemudian menjadi kontroversi, namun rencana urun dana itu ternyata juga sudah dituangkan dalam Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Pendanaan IKN sebagai turunan dari UU IKN yang disebut sebagai sumber

pembiayaan kreatif (creative funding/ financing) (RPP Pendanaan IKN, 2022).

Ketiadaan rencana strategis komunikasi IKN dari Kemenkominfo dan tidak disiapkannya narasi tunggal mengenai pendanaan pembangunan IKN merupakan salah satu faktor penyebab komunikasi politik pemerintah sebagai komunikator politik menjadi simpang siur dan kontraproduktif.

Transparansi Informasi Pendanaan IKN

Soal transparansi informasi pendanaan pembangunan IKN yang masih dipertanyakan, juga menjadi faktor munculnya problematika komunikasi politik pendanaan IKN. Rencana Induk IKN yang merupakan Lampiran Undang-Undang IKN menyebutkan adanya 5 tahap pembangunan ibu kota baru ini dalam rentang tahun dari 2022-2045. Tantangan dalam 5 tahap ini dari aspek pendanaan Bappenas telah menyiapkan proyeksi pendanaan IKN yang terbagi dalam tiga sumber pendanaan. Pertama, sekitar 19,2% atau Rp 89,4 triliun didanai APBN, kedua, sebesar 54,4% atau Rp 253,4 triliun dari dana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan ketiga, sebesar 26,4 persen atau Rp 123,2 triliun diharapkan didanai swasta. Sumber pendanaan terbesar yaitu 54,4% diharapkan dapat didanai dari KPBU atau yang sering disebut juga Public Private Partnership (PPP). Harapannya skema pembiayaan dari Public Private Partnership ini, pemerintah dan swasta dapat berbagi tanggung jawab dan risiko, Pihak pemerintah akan merencanakan

pembangunan infrastruktur publik dan peran pihak swasta adalah menyediakan dan mengelola infrastruktur publik selama jangka waktu tertentu yang disepakati (Wulandari, 2022).

Transparansi sumber pendanaan IKN ini sejak awal perlu dilakukan. Pada rencana pendanaan, APBN hanya akan menanggung kurang dari 20%. Sisanya sekitar 80% dari KPBU dan swasta. Penting untuk membuka kepada publik atau melakukan komunikasi mengenai rencana mitigasi bila pendanaan terbesar yang bersumber dari KPBU dan swasta tidak terpenuhi sesuai tahapan yang direncanakan. Misalnya bila pada akhirnya harus ditanggung oleh APBN, sebagaimana yang kemudian terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung., di mana akhirnya Pemerintah memutuskan untuk lebih banyak menggunakan APBN dalam pembiayaan proyek tersebut.

Kekhawatiran bahwa pada akhirnya APBN akan menanggung beban pendanaan IKN bila swasta dan investor tidak menunjukkan kepastian investas di IKN, tentu saja sangat beralasan. Mengingat pasca Pandemi Covid-19 ekonomi Indonesia belum pulih. Juga data dari IMF yang memprediksi perlambatan ekonomi global tahun 2023 akibat perang di Rusia-Ukraina, juga naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok, yang mendorong para investor untuk berinvestasi pada aset-aset yang aman. Sementara itu proyek IKN pada dasarnya memindahkan aktivitas tata kelola administrasi pemerintahan dan bukan aktivitas bisnis dan ekonomi atau

perdagangan. Maka kekhawatiran IKN membebani APBN dilandasi arfgumentasi bahwa Pemerintah dinilai melakukan spekulasi dengan memulai pembangunan menggunakan APBN, karena belum tentu ke depannya swasta akan tertarik (Anugrah, 2022).

Dalam konteks komunikasi politik Pemerintah tidak merespon kekhawatiran tersebut secara cukup memadai. Dampaknya adalah munculnya spekulasi yang membuat publik menjadi kurang yakin apakah pendanaan pembangunan IKN benar-benar bisa diandalkan dari investor.

Mitigasi Komunikasi Krisis

Tidak adanya mitigasi komunikasi krisis menjadi faktor yang menimbulkan problematika komunikasi politik pendanaan IKN. Sebagai ilustrasi, calon investor pembangunan IKN yang sudah menyatakan komitmennya, yakni raksasa konglomerasi keuangan asal Jepang Softbank melalui CEO Softbank Masayoshi Son menyatakan mundur dari jajaran calon investor, persis dua hari menjelang Presiden Jokowi melakukan upacara ritual 'tanah dan air' di calon lokasi IKN Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada 13 Maret 2022.

Softbank mengusulkan adanya jaminan 5 juta penduduk akan mendiami IKN, sementara Bappenas merencanakan IKN hanya akan dihuni sekitar 1,9 juta penduduk. Pemerintah menganggap permintaan Softbank ini tidak realistis.

Kabar yang beredar, Softbank menilai bila hanya dihuni oleh sekitar 2 juta penduduk maka secara ekonomi tidak akan menarik bagi investasi, karena pasar tidak akan bergerak dengan layak (Pratama, 2022).

Bila mengacu pada teori ekonomi politik dengan pendekatan klasik yang memiliki proposisi bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri, maka apa yang menjadi alasan Softbank, bahwa perlu 5 juta penduduk supaya ekonomi di IKN dan sekitarnya bergerak, bisa dipahami. Sebaliknya, bila Pemerintah hanya akan mendanai sekitar 20% selebihnya akan diserahkan ke swasta dan KPBU maka bisa dimaknai bahwa pemerintah sedang menginginkan pembangunan IKN diserahkan kepada pasar dan membiarkan pasar bekerja sendiri (*Laissez-faire*) (Caporaso, 2008). Padahal bila benar-benar diserahkan kepada pasar untuk bergerak sendiri, rencana Pemerintah bahwa IKN yang akan dihuni oleh sekitar 2 juta penduduk dinilai tidak memadai untuk membuat pasar bergerak. Artinya pada akhirnya nanti justru Pemerintah harus banyak mendanai sendiri baik pembangunan maupun operasionalisasi IKN. Bila hal ini terjadi maka akan meleset dari kebijakan semula tentang IKN, bahwa APBN hanya akan mendanai 20 peesen.

Namun demikian dalam konteks komunikasi politik, mengenai batalnya calon investor potensial ini Pemerintah tidak merespon dengan memadai dalam kerangka logika pasar tersebut. Misalnya saja bisa dengan memberi penjelasan yang rasional bahwa dengan 1,9 juta penduduk

ekonomi dan pasar akan bergerak untuk pertumbuhan IKN ke depannya dengan argumentasi yang meyakinkan. Sayangnya, respon yang muncul adalah dengan menyatakan bahwa permintaan Softbank tidak realistis.

Respon yang lain adalah berupa klaim bahwa masih banyak investor yang berminat. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, misalnya, mencoba meyakinkan publik bahwa beberapa negara tertarik berinvestasi dalam pembangunan IKN, seperti China, Korea, Taiwan dan Uni Eropa (Alfarizi, 2022). Bahlil bahkan memastikan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) berminat berinvestasi di IKN dengan komitmen investasi senilai USD 20 miliar. Menurut Bahlil, hal itu sudah diberikan melalui Indonesia Investment Authority (INA). Di sisi lain Bappenas menyatakan bahwa para calon investor itu masih menunggu skema sebagai pedoman berinvestasi yang ditawarkan Pemerintah, yang akan menjadi pertimbangan mengenai untung rugi berinvestasi di IKN.

Masalahnya, bagaimana bila setelah skema berinvestasi di IKN itu nantinya membuat investor berpikir ulang untuk menanam modal dalam pembangunan IKN, sebagaimana yang terjadi pada Sofbank. Karena para calon investor tentu menunggu skema yang menguntungkan secara bisnis. Sementara batalnya Softbank bisa dikatakan sebagai bagian dari komunikasi politik yang membutuhkan penanganan komunikasi krisis. Dalam konteks ini Pemerintah, dan para pejabat sebagai komunikator politik ternyata tidak menyikapi 'krisis' tersebut

dengan komunikasi krisis yang diperlukan. Padahal mundurnya Softbank sedikit banyak akan mempengaruhi calon investor lainnya.

IV.SIMPULAN

Problematika komunikasi politik pendanaan pembangunan IKN terindikasi dari munculnya penolakan dan gugatan terhadap kebijakan pemindahan IKN yang dinilai berisiko tinggi. Bila pendanaan IKN dibebankan kepada APBN tidaklah realistis, mengingat kondisi pasca-Pandemi ekonomi nasional belum pulih dan perlambatan ekonomi yang diprediksi IMF akan terjadi, sehingga tekanan terhadap APBN bakal makin besar. Sedangkan mengharapkan pendanaan IKN dari investasi asing yang belum pasti memerlukan insentif pasar yang kondusif untuk investasi. Sementara jumlah penduduk IKN yang direncanakan hanya sekitar 1,9 juta jiwa dinilai tidak akan menggerakkan pasar secara layak, bila mengacu pada teori ekonomi klasik *Laissez-faire*, membiarkan pasar bekerja sendiri (Caporaso, 2008).

Munculnya problematika komunikasi politik mengenai pendanaan pembangunan IKN, karena adanya 3 faktor berikut ini:

Tidak terdapat rencana strategi komunikasi politik pembangunan IKN di dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2020-2024. Sehingga 'komunikator' pemerintah (Model Analisis Komunikasi Laswell) tidak memiliki acuan yang jelas. Juga tidak terdapat 'narasi tunggal' sebagai

'pesan' yang kuat dalam komunikasi politik dengan argumen yang kokoh mengenai pendanaan pembangunan IKN. Akibatnya komunikasi politik pemerintah menjadi simpang siur dan kontraproduktif.

Komunikasi pendanaan pendanaan IKN tidak transparan, misalnya dalam hal bila investor yang akhirnya berinvestasi tidak sebagaimana yang diharapkan. Transparansi sumber pendanaan IKN ini sejak awal perlu dilakukan. Pada rencana pendanaan, APBN hanya akan membiayai kurang dari 20%. Sisanya sekitar 80% dari KPBU dan swasta, yang menyiratkan pendanaan IKN ini akan diserahkan kepada mekanisme pasar sebagaimana pendekatan ekonomi klasik dalam teori ekonomi politik Caporaso. Penting untuk melakukan komunikasi mengenai rencana mitigasi bila pendanaan terbesar yang berasal dari KPBU dan swasta tidak terpenuhi sesuai tahapan yang direncanakan.

Mitigasi komunikasi krisis tidak dipersiapkan dengan baik. Mundurnya Softbank dari daftar investor bisa dikatakan sebagai bagian yang membutuhkan penanganan krisis komunikasi. Namun kenyataannya Pemerintah, dan para pejabat selaku komunikator politik tidak menyikapi 'krisis' tersebut dengan komunikasi krisis yang memadai. Padahal mundurnya Softbank sedikit banyak akan berpengaruh pada calon investor lainnya.

Tiga faktor penyebab problematika komunikasi politik pendanaan IKN tersebut mestinya dicarikan solusi dan tidak dibiarkan. Perlu agenda setting yang

dibutuhkan, termasuk menentukan komunikator Pemerintah dan 'narasi tunggal' yang sesuai sebagai 'pesan' yang kuat, bila memang alasan pemindahan IKN didasarkan pada argumen yang kokoh. Transparan dan sikap terbuka dalam komunikasi politik juga perlu guna membangun kepercayaan publik dan investor. Karena bila hal itu tidak dilakukan, maka membuat publik akan cenderung meragukan bahwa isu pendanaan IKN mampu dikelola dengan baik oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. K. (2022, Desember 14). Tempo.co. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1668279/bahlil-sebut-negara-asal-investor-ikn-uea-cina-taiwan-korea-selatan-dan-eropa>
- Anugrah, P. (2022, November 12). IKN Nusantara: Siapa yang Mendanai Pembangunan Ibu Kota Baru?
- Baharudin, N. Q. (Maret 2022). Bibliometric Analysis of Socio-Political Research on Capital Relocation: Examining Contributionsto the Case of Indonesia. *Journal of Local Government Issues LOGOS* 5 (1).
- Caporaso, J. A. (2008). *Teori-Teori Ekonomi Politik*, Penerjemah, Suraji. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- CNN Indonesia. (2022, Oktober 10). CNN Indonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220720140507-12-823876/mk-tolak-3-gugatan-uu-ikn-termasuk-dari-din-syamsuddin>
- Creswell, J. J. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fairoussaniy, M. (2022, Maret 29). kaltim.tribunnews.com. Retrieved from

- <https://kaltim.tribunnews.com/2022/03/29/tanggapi-isu-crowdfunding-pembangunan-ikn-wagub-hadi-mulyadi-beritanya-masih-simpang-siur>
- Gaffar, E. N. (2022). *Symposium IKN: Challenges and Obstacles Scholarly Approach*. Jakarta: Pascasarjana Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia.
- Greenpeace Indonesia. (2019, Agustus 27). [Greenpeace.org](https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3652/tanggapan-greenpeace-indonesia-terhadap-rencana-pemindahan-ibu-kota-indonesia-ke-kalimantan-timur/). Retrieved from <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3652/tanggapan-greenpeace-indonesia-terhadap-rencana-pemindahan-ibu-kota-indonesia-ke-kalimantan-timur/>
- Harisson, L. (2007). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Hariyadi. (Juni 2020). Kendala dan Tantangan Implementasi Kebijakan Pemindahan IKN pada Masa Pandemi Covid-19. *Parliamentary Review* Vol. II No. 2.
- Haryanti, R. (2022, Oktober 10). Pidato Kenegaraan Jokowi an Wacana Pemindahan Ibu Kota, [Kompas.com](https://www.kompas.com).
- INDEF. (2019). *Brief Policy: Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
- Koran Tempo. (2022). *Monolak Konsultasi Basa-Basi*. Jakarta: PT. Tempo Inti Media, Tbk.
- Majelis Media MPR. (2022). *Pemindahan Ibu Kota Negara*. Jakarta: Majelis Media MPR Edisi 03/XV/Maret 2022.
- Pratama, R. A. (2022, Maret 25). [Katadata](https://katadata.co.id/rezzaaji/indepth/623d64a757dd8/beban-berat-apbn-menanggung-pembiayaan-ikn). Retrieved from [Katadata.co.id: https://katadata.co.id/rezzaaji/indepth/623d64a757dd8/beban-berat-apbn-menanggung-pembiayaan-ikn](https://katadata.co.id/rezzaaji/indepth/623d64a757dd8/beban-berat-apbn-menanggung-pembiayaan-ikn).
- Proklolon, T. (2016). *Komunikasi Politik*. -: Gramedia Pustaka Utama.
- Saputro, A. D. (2022, Oktober 18). [politik.brin.go.id](https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/absennya-kepublikan-dalam-wacana-pemindahan-ibu-kota-negara/). Retrieved from <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/absennya-kepublikan-dalam-wacana-pemindahan-ibu-kota-negara/>
- Syaka, H. d. (2022). Analisis Komunikasi Politik dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*.
- Victoria, A. O. (2022, Oktober 10). [Katadata.co.id](https://katadata.co.id). Retrieved from [Agatha Olivia Victoria, \(2022\), Bappenas: APBN Danai Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Rp. 93,5 Triliun, Katadata.co.id, https://katadata.co.id/berita/2019/08/21/bappenas-apbn-danai-biaya-pemindahan-ibu-kota-negara-rp-935-diakses-10-Oktober-2022.](https://katadata.co.id)
- Wahid, U. (2016). *Komunikasi Politik, Teori, Konsep dan Aplikasi pada Era Medi Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wulandari, E. (2022). *Policy Brief Public Private Partnership Sebagai Solusi Pembiayaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
- Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendanaan IKN, draf 18 Maret 2022.
- Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)
-